

# METODE PENENTUAN PRIORITAS KECAMATAN MISKIN SASARAN PROGRAM GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Oleh : Syarifudin Latinulu; Djumadlas Abunain; dan Syafrudin

## ABSTRAK

Dibutuhkan metode alternatif penentuan prioritas kecamatan miskin sasaran program sektoral karena masalah-masalah sektoral, khususnya kesehatan dan gizi tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan hasil identifikasi desa-desa miskin oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan ialah kombinasi dari dua cara/pendekatan penentuan kecamatan miskin. Cara pertama ialah 20% desa miskin per kecamatan, pendekatan kedua ialah penggunaan dua atau lebih dari lima variabel indikator kemiskinan tingkat kecamatan (TK, jalan tanah, listrik, sarana transportasi utama dari Data PODES, dan prevalensi gizikurang-TBABS). Kecamatan yang terdeteksi sebagai kecamatan miskin oleh dua cara tersebut adalah kecamatan prioritas utama sasaran program sektoral; sedangkan yang terdeteksi miskin oleh satu di antara dua cara tersebut di atas adalah prioritas berikutnya. Data yang digunakan adalah data TBABS-1988 KLH-Puslibang Gizi, data PODES-1986, PODES-1990, dan desa-desa Miskin BPS-1993. Uji regresi logistik dan uji sensitifitas dan spesifisitas digunakan untuk penentuan variabel indikator kemiskinan. Dari 458 kecamatan sampel di tiga provinsi (Sumbar, Jateng dan NTB) terdapat 183 kecamatan miskin yang terdeteksi sebagai kecamatan prioritas pertama sasaran program kesehatan dan gizi dan 159 kecamatan prioritas berikutnya. Daftar kecamatan miskin dari studi ini terlampir. Dengan metode ini maka penentu kebijakan kesehatan dan gizi pada tingkat kabupaten/kotamadya mempunyai dasar perencanaan pengalokasian dana dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui sektor kesehatan dan gizi. Untuk menunjang kemudahan perencanaan dari bawah maka keberadaan buku Kabupaten Dalam Angka yang memuat data potensi kecamatan yang bersumber dari data PODES yang dilengkapi dengan data status gizi anak (Balita atau anak SD-KLs. 1) yang seragam dan dengan kualitas yang baik menjadi sangat penting.

## Pendahuluan

Salah satu prioritas utama pembangunan dalam Repelita VI ialah penanggulangan daerah dan masyarakat miskin. Jumlah penduduk miskin yang saat ini sebanyak 25,9 juta (13,7%) diupayakan agar dapat diturunkan menjadi 12 juta (6%) pada akhir PELITA VI (Mubyarto, 1994). Upaya kearah itu telah diawali melalui pendekatan pengembangan kawasan terpadu (PKT) (Mubyarto 1994, Sayogyo, 1994) yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa-desa yang mempunyai permasalahan khusus melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program dengan arahan kegiatan dan dukungan intensif dari aparat pemerintah daerah. Dari penerapannya, program PKT tersebut dinilai masih mengalami beberapa kendala dalam upaya pencapaian target penurunan kemiskinan penduduk dan juga daerah miskin di Indonesia (Mubyarto).

Dalam upaya mempercepat dan mempertajam sasaran program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan identifikasi desa-desa miskin secara nasional (20633 desa miskin) oleh Biro Pusat

Statistik (BPS), 1993. Upaya ini diikuti oleh komitmen gerakan nasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan INPRES No. 5 tahun 1993, tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan (Siagian, 1944) yang kemudian dilengkapi dengan program IDT (Inpres desa tertinggal) 1993 (Sayogyo, 1994).

Sasaran program IDT adalah penduduk miskin dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tidak selalu merupakan intervensi berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan desa miskin. Jadi hasil identifikasi desa-desa tersebut digunakan sebagai dasar penentuan prioritas wilayah sasaran penanggulangan kemiskinan karena penduduk miskin di desa-desa "maju" tidak terjangkau oleh program IDT.

Namun demikian terdapat kesan bahwa diharapkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dapat pula meningkat status desa tertinggal menjadi desa maju. Jika demikian, nilai kualitas fisik sumber daya manusia (SDM) seharusnya juga termasuk sebagai salah satu tolok ukur penentuan desa-desa miskin. Di pihak lain, pada variabel indikator yang digunakan untuk penentuan desa miskin (BPS 1993) variabel/patokan nilai kualitas fisik SDM secara khusus belum termasuk.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan fisik adalah pertambahan tinggi badan anak sejalan dengan pertambahan umurnya yang merupakan refleksi dari gambaran status kesehatan dan gizi pada masa lalu. Untuk keperluan pemantauan perkembangan situasi dalam bidang gizi, ukuran yang lazim digunakan adalah prevalensi gizikurang pada anak (TB/U). Hasil penelitian Djumadias (1987) di tiga provinsi di Indonesia dan hasil penelitian dari beberapa negara (Martorel, dkk., 1988), menunjukkan bahwa pertumbuhan anak usia 7 tahun di wilayah/daerah tertinggal mengalami keterlambatan atau lebih pendek 3-4 cm dibandingkan dengan anak seusianya yang hidup dalam lingkungan keluarga dan wilayah yang sudah maju. Juga penelitian di India menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan keluarga berkorelasi dengan menurunnya jumlah anak-anak yang pendek (stunted) menurut usianya (Keller, 1988).

Prevalensi gizikurang-TBABS kurang kuat digunakan sebagai prediktor tunggal penentuan kecamatan miskin; tetapi dapat digunakan sebagai salah satu variabel indikator yang secara bersama-sama dengan variabel sosial-ekonomi dapat mempertajam analisis dalam menentukan kecamatan miskin (Djumadias, 1994). Atas dasar ini prevalensi gizikurang TBABS anak usia 6-7 tahun dapat digunakan sebagai alternatif penentuan daerah miskin. Selain itu, dikemukakan pula bahwa persentase 20% desa miskin dalam kecamatan atas dasar variabel sosial ekonomi data PODES juga merupakan alternatif penentuan kecamatan miskin. Apabila hasil analisis ini dikombinasi dengan hasil penentuan wilayah miskin atas dasar persentase desa miskin per-kecamatan, maka hasilnya dapat merupakan kecamatan miskin prioritas sasaran program pembangunan baik secara sektoral maupun non-sektoral.

Artikel ini menyajikan bahasan tentang cara alternatif penentuan kecamatan miskin prioritas dalam penanggulangan kemiskinan untuk program sektoral, khususnya program gizi dan kesehatan masyarakat. Kajian ini merupakan bagian dari studi penggunaan "Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah untuk Pemetaan Daerah Miskin".

## Metode Penelitian

Data yang digunakan adalah data tinggi badan anak kelas I-baru sekolah dasar (TBABS) tahun 1988, data PODES 1986 dan 1990 BPS), dan publikasi daftar desa-desa miskin BPS-1993 untuk provinsi-provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Abunain, 1994).

Analisis untuk penentuan kecamatan miskin adalah kombinasi dari dua cara/pendekatan. Pendekatan pertama ialah persentase desa miskin per-kecamatan dan pendekatan kedua ialah penggunaan 5 variabel (4 variabel sosial ekonomi PODES dan 1 variabel kualitas fisik/petumbuhan anak).

Untuk pendekatan pertama digunakan daftar desa miskin hasil analisis mengikuti prosedur BPS untuk data PODES 1990 dan 1986 dan laporan BPS 1993.

Uji regresi logistik dan uji sensitifitas spesifisitas digunakan untuk mengetahui variabel yang secara bersama sebagai determinan kemiskinan. Pada tahap akhir dilakukan padanan antara ketiga hasil analisis dengan dua macam pendekatan tersebut guna memperoleh kecamatan-kecamatan prioritas dalam program sektoral berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Variabel dengan titik batas (kriteria) tertentu yang digunakan untuk menyatakan suatu kecamatan disebut miskin dalam penelitian "TBABS untuk pemetaan daerah miskin" ada sebelas (Abunain, 1994). Lima dari kriteria tersebut ialah (1) pendidikan; miskin apabila jumlah desa yang memiliki TK < 30% per-kecamatan, (2) jalan tanah. Miskin apabila jumlah desa yang mempunyai jalan tanah sebagai jalan utama desa  $\geq 15\%$ , (3) ratio sarana angkutan. Miskin apabila jumlah desa yang mempunyai sarana angkutan utama bukan roda-empat < 15%, (4) ratio rumah berlistrik. Miskin apabila jumlah desa yang mempunyai listrik < 50%, dan (5) prevalensi gizi kurang-TBABS pada titik batas 40%.

## Hasil dan Bahasan

Cara/pendekatan penentuan kecamatan miskin dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri. (Dijen Bangdes, 1991) dan telah digunakan sejak tahun 1982 dan ditetapkan sebagai kecamatan yang diberikan prioritas dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Selain pendekatan ini, telah digunakan pula pendekatan lain dengan analisis faktor dengan menggunakan data PODES, oleh Susetio tahun 1990 untuk data PODES-'86 Jawa Barat dan PODES Nusa Tenggara Timur oleh Soemardjo pada tahun 1991 (Sayogyo 1994). Namun pada kedua pendekatan tersebut belum digunakan kualitas fisik sumber daya manusia (KFSDM) sebagai variabel indikator penentuan kemiskinan, karena dalam data PODES memang variabel KFSDM itu belum ada. Kekurangan informasi yang tersedia dalam data PODES, khususnya yang berkaitan dengan penentuan desa-desa miskin, telah dikemukakan oleh pihak BPS sendiri (Ka. BPS, 1993) dan Wirosardjono 1993.

Dalam bahasan ini dilakukan kajian cara alternatif penentuan kecamatan miskin yang dapat digunakan untuk penetapan prioritas wilayah dalam program sektoral berkaitan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan. Di sini digunakan pendekatan dengan menggabungkan hasil analisis dua cara penentuan kecamatan miskin, yaitu pertama, persentase desa miskin dalam kecamatan dengan titik batas (cut off point) 20% dan kedua, jika terdapat dua variabel atau lebih dari lima variabel indikator yang menunjukkan adanya kemiskinan pada suatu kecamatan (Abunain 1994). Kelima variabel yang digunakan tersebut ialah taman kanak-kanak (TK), jalan tanah, listrik, sarana transportasi utama, dan prevalensi gizi kurang-TBABS pada titik batas 40% di tingkat desa.

Adanya TK dan listrik di sebagian besar desa menunjukkan kemampuan ekonomi warga desa untuk membayar biaya penerangan listrik dan juga biaya pengenalan pendidikan paling awal anaknya di taman kanak-kanak. Keluarga yang kurang mampu umumnya tidak memasukkan anaknya ke TK

karena biaya anak TK/bulan diketahui lebih tinggi dari biaya anak sekolah dasar (SD). Di samping itu upaya mendirikan TK, berkaitan dengan tingkat kemajuan masyarakat desa dalam pendidikan. Di lain pihak, masih banyaknya desa yang memiliki jalan tanah (bukan jalan yang diperkeras) sebagai jalan utama dan sarana transportasi-utama bukan roda empat merupakan indikasi rendahnya potensi ekonomi wilayah tersebut. Demikian pula halnya dengan status gizi anak di suatu wilayah. Di wilayah yang kondisi lingkungannya kurang memadai, pertumbuhan anak-anak mengalami hambatan karena berbagai sebab, khususnya karena penyakit infeksi, diare dan konsumsi zat gizi yang kurang. Pada kondisi lingkungan yang demikian maka status kesehatan, status gizi dan kebugaran tubuh juga rendah, yang secara langsung atau pun tidak langsung menghambat pertumbuhan fisik anak. Dampak lingkungan dan penyakit infeksi terhadap pertumbuhan anak telah lama dikenal dan dibahas oleh ahli-ahli di berbagai bidang berdasarkan hasil penelitian di Indonesia ( Tumbelaka 1974; Ratna Indrawati 1976, Gracey 1976) dan berbagai negara di dunia (Scrimshaw 1965; Mata 1971; Tomkins 1981). Pada daerah yang kondisi lingkungannya baik dan sesuai untuk pertumbuhan optimal maka tinggi badan anak akan bertambah sejalan dengan bertambahnya umur.(Tanner 1978) dan pada kondisi yang kurang menguntungkan maka tinggi badan anak mengalami hambatan, yang juga disertai kekurangan berat badan karena penyakit infeksi,diare dan sebagainya. Pertumbuhan anak digambarkan sebagai dampak interaksi dari semua hasil pembangunan pada berbagai bidang (Chen, 1979). Pengaruh perkembangan daerah atau wilayah terhadap tinggi badan manusia sebenarnya sudah dikemukakan oleh Villerme dalam tahun 1829 (Jelliffe 1989) yang menyatakan bahwa manusia akan lebih tinggi dan pertumbuhannya lebih cepat pada daerah yang kaya (maju) karena semua sektor menunjangnya dan sebaliknya kemiskinan memperlambat pencapaian pertumbuhan dan tinggi dewasa juga terhambat. Atas dasar ini maka status gizi-TB/U anak yang baru masuk sekolah merupakan tolok ukur yang tepat untuk memantau perkembangan suatu wilayah.

Hasil analisis penentuan kecamatan miskin menggunakan data PODES 1986 dan Publikasi desa-desa miskin-BPS 1993 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah kecamatan miskin menurut dua macam titik batas kemiskinan**

	20% DM		> = 2 var. dari 5 var.
	PODES-86	BPS-93	
Miskin	257	256	269
Tak miskin	201	202	189
Jumlah	458	458	458

Pada Tabel 1 tampak bahwa dengan menggunakan pendekatan pertama, yaitu 20% desa miskin, diperoleh jumlah kecamatan yang teridentifikasi miskin dari kedua set data (PODES-1986 dan desa miskin menurut laporan BPS 1993) relatif sama. Tetapi dengan pendekatan kedua, yaitu jika dua variabel atau lebih dari lima variabel yang menunjukkan adanya kemiskinan, maka jumlah kecamatan miskin yang teridentifikasi meningkat menjadi 269 kecamatan atau bertambah 4,7%.

Penajaman penilaian kemiskinan wilayah dapat lebih baik jika penentuan kecamatan miskin dilakukan terhadap daftar desa miskin laporan BPS-1993 dengan mengkombinasi atau padanan hasil kedua cara yang dikemukakan di atas. Dari hasil tersebut diperoleh empat kelompok yang akhirnya dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok kemiskinan wilayah seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Jika pada hasil masing-masing pendekatan (Tabel 1) hanya dapat diperoleh jumlah kecamatan yang miskin maka pada Tabel 2, dengan cara kombinasi dimaksud, tampak penajaman penilaian penentuan kecamatan miskin. Kecamatan miskin yang teridentifikasi oleh kedua cara secara bersama adalah kecamatan yang benar-benar miskin. Atas dasar ini maka kecamatan yang teridentifikasi miskin oleh kedua cara tersebut merupakan daerah yang perlu mendapat prioritas pertama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari sektor kesehatan dan lintas sektor (non gizi dan kesehatan). Kecamatan yang hanya diidentifikasi miskin oleh salah satu dari dua cara tadi diberikan prioritas kedua.

**Tabel 2. Jumlah kecamatan miskin prioritas penanggulangan kemiskinan secara sektoral menurut dua cara analisis\***

Tingkat Kemiskinan	Jumlah Kecamatan	Prioritas
Miskin		
- teridentifikasi miskin oleh dua cara	183	1
- teridentifikasi miskin satu dari dua cara	159	2
Tak miskin		
- semua mengidentifikasi tak miskin	116	-
Jumlah	458	

\*) Cara pertama : 20% desa miskin: per kecamatan,  
Cara kedua apabila 2 variabe dari 5 variabel indikator kemiskinan.

Penajaman prioritas sasaran ini menjadi sangat dibutuhkan karena fakta di daerah-daerah yang diperoleh dari studi penjajagan "Penelitian TBABS-untuk pemetaan daerah miskin 1994" menunjukkan bahwa masalah-masalah sektoral, khususnya kesehatan dan gizi tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan hasil identifikasi desa-desa miskin. Di lain pihak sektor-sektor termasuk kesehatan dan gizi dituntut untuk menunjang dan mengarahkan program-programnya pada upaya penanggulangan kemiskinan.

Hasil analisis lebih lanjut tentang hubungan antara kedua cara pendekatan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Pada tabel 3 di sajikan tabel silang penilaian kecamatan miskin berdasarkan analisis menggunakan indikator = 2 var. pada prevalensi gizikurang 40% dengan hasil laporan BPS 1993 dengan kriteria 20% desa miskin per-kecamatan, dan pada Tabel 4 perbandingan hasil analisis dengan menggunakan

data PODES 1986 dan laporan BPS 1993 kriteria 20% desa miskin untuk kemiskinan tingkat kecamatan.

**Tabel 3. Kesesuaian ketepatan kemiskinan berdasarkan miskin 93\* dan Kategori  $\geq 2$  variabel\***

		Miskin 93		Jumlah
		Tak miskin	Miskin	
$\geq 2$ var *	Tak miskin	116 57.4%	73 28.5%	189
	Miskin	86 42.6%	183 71.5%	269
Total :		202	256	458

\* Miskin93 : kemiskinan berdasarkan 20 % desa miskin dalam kecamatan menggunakan desa miskin BPS 1993.

\*\* = 2-var. = Kemiskinan berdasarkan 2 atau lebih dari 5 variabel pada prevalensi izikurang 40%

**Tabel 4. Kesesuaian ketepatan kemiskinan berdasarkan miskin93\* dan PODES86 pada titik batas kemiskinan 20%\*\***

		Miskin 93*		Total
		Tak miskin	Miskin	
PODES86	T. Miskin	117 57.9%	84 32.8%	201
	Miskin	85 42.1%	172 67.2%	257
	Jumlah	202	256	458

\* Miskin93 : kemiskinan berdasarkan 20 % desa miskin dalam kecamatan menggunakan desa miskin BPS 1993.

\* Miskin20% : kemiskinan berdasarkan 20% desa miskin dalam kecamatan.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa jumlah kecamatan yang betul-betul miskin adalah 71,5 % dari jumlah kecamatan miskin yang diidentifikasi oleh keduanya. Pada Tabel 4 tampak kalau kecamatan miskin didasarkan pada batas 20% desa miskin menurut laporan BPS 1993 dan batas 20% berdasarkan data PODES 1986 maka jumlah kecamatan miskin yang dinyatakan oleh kedua cara adalah 67,2 %. Kedua cara dengan analisis Se-Sp menunjukkan false positive sekitar 25%.

Berdasarkan hasil analisis ini dengan menggunakan indikator + 2 var. pada prevalensi gizikurang 40% dan menerapkannya pada wilayah miskin atas dasar Laporan BPS 1993, dapat digunakan untuk pemetaan prioritas daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maupun untuk memantau perkembangan desa miskin.

Daftar kecamatan miskin untuk provinsi-provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang diidentifikasi dengan dua cara penentuan kecamatan, yaitu pertama, atas dasar = 2 variabel pada prevalensi gizikurang 40%, dan kedua dengan batas 20% desa miskin-daftar desa miskin BPS 1993, disajikan pada Tabel 5 terlampir.

Dari pembicaraan terdahulu ternyata bahwa pendekatan yang berbeda mengenai kemiskinan wilayah kecamatan di Indonesia menghasilkan jumlah kecamatan miskin yang berbeda. Juga dari sejumlah variabel data PODES yang ditemukan cukup kuat peranannya sebagai indikator kemiskinan wilayah ialah adanya Taman Kanak-kanak (TK), listrik, jalan tanah, sarana utama transportasi di desa. Di samping itu penambahan nilai kualitas fisik sumber daya manusia (KFSDM) berupa prevalensi gizikurang-TBABS pada indikator sosial ekonomi data PODES memperkuat keberadaan kelompok indikator tersebut sebagai indikator kemiskinan wilayah dan kemiskinan penduduknya.

Sehubungan dengan hal di atas kombinasi hasil penentuan wilayah miskin dengan menerapkan cara/penedekatan = 2 variabel prediktor dan 20% desa miskin dalam kecamatan pada daftar desa miskin menurut laporan BPS 1993 dapat digunakan untuk menetapkan urutan prioritas kecamatan dalam program sektoral khususnya program kesehatan dan gizi dalam rangka menunjang upaya penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian masalah peningkatan kualitas dan keseragaman data PODES yang dikumpulkan secara periodikoleh daerah-daerah perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Untuk menunjang kemudahan perencanaan dari bawah maka keberadaan buku Kabupaten Dalam Angka kabupten yang memuat data potensi kecamatan yang bersumber dari data PODES yang seragam dengan kualitas yang baik menjadi sangat penting.

#### **Rujukan.**

1. Abunain, D.; dkk. Status gizi anak baru masuk SD sebagai indikator sosial-ekonomi penduduk. Laporan Penelitian. Jakarta : Kantor Meneg. KLH dan Puslitbang Gizi Depkes RI 1987, 33-48.
2. Abunain, D.; dkk.. Tinggi badan anak sekolah dasar (TBABS) untuk pemetaan daerah miskin. Laporan Penelitian. Bogor : Puslitbang Gizi Depkes R.I., 1994.
3. Abunain, D.; dkk. Tinggi badan anak baru masuk sekolah dasar sebagai indikator sosial ekonomi wilayah. Gizi Indonesia 1988, 13 (2):40-50.
4. Abunain, D.; Syarifudin Latinulu; dan Syafrudin. Tinggi badan anak baru masuk sekolah dan hubungannya dengan kemiskinan wilayah. Penel Gizi Makan 1994, (17).
5. Biro Pusat Statistik . Daftar nama dan indeks peta desa miskin menurut kabupaten/kotamadya dan kecamatan provinsi di Bali, NTB, NTT, Timtim, Maluku, dan Irija. Jakarta : BPS - PM04B, 1993.

6. Biro Pusat Statistik. Daftar nama dan indeks peta desa miskin menurut kabupaten/kotamadya dan kecamatan provinsi di pulau Sumatera. Jakarta : BPS - PM02B, 1993.
7. Biro Pusat Statistik. Daftar nama dan indeks peta desa miskin menurut kabupaten/kotamadya dan kecamatan provinsi di pulau Jawa dan Madura. Jakarta : BPS - PM01B, 1993.
8. Biro Pusat Statistik. Laporan Penentuan Desa Miskin. Jakarta : BPS (a), 1993.
9. Biro Pusat Statistik. Laporan Penentuan Desa Miskin. Jakarta : BPS (b), 1993
10. Direktorat Bangdes. Daftar kecamatan minus, rawan, padat penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1981/1982. Mataram : Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat., 1982.
11. Dirjen Bangdes. Data dan informasi desa dan kelurahan yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan, tahun 1989/1990. Jakarta : Dirjen Bangdes, Depdagri, 1991.
12. Gracey, M., D.E. Stone, Sutoto, and Sutejo. Environmental pollution and diarrhoeal disease in Jakarta, Indonesia. *Enviremental Child Health*. Feb. 1976. pp. 18-23.
13. Indrawati, R. The hazard of malnutrition in early infant. *Paediatrica Indonesiana* 16, Jan-Feb 1976. pp.
14. Biro Pusat Statistik. Kemiskinan di Indonesia. Makalah Kepala BPS pada: Lokakarya peningkatan ketahanan pangan untuk menanggulangi kemiskinan. Kantor Menteri negara Urusan Pangan dan Kepala Bulog. Jakarta 17 Juli 1993.
15. Keller, W. The epidemiology of stanting. In: *Linear growth retardation in less developed countries*. J. C. Waterlow (Editor). Nestle Nutrition workshop Series Volume 14. New York : Raven Press. 1988, pp. 22-29.
16. Martorel, R., Mendoza, F., and Castillo, R. Poverty and stature in children. In: *Linear growth retardation in less developed countries*. J. C. Waterlow (Editor). Nestle Nutrition workshop Series Volume 14. New York : Raven Press 1988, pp. 57-63.
17. Martorel, R., J.P. Habich, C. Yarbrough, A. Lechtig, R.E. Klein, dan K.A. Western. Acute morbidity and physical growth in rural Guatemalan children. *Am. J. Dis. Child-Vol* 129, Nov. 1975. pp. 1296-1301.
18. Mubyarto. Strategi pembangunan ekonomi menuju pengurangan kemiskinan. Makalah pada Simposium Nasional Penanggulangan Kemiskinan. DRN. Jakarta 17 Sptember 1944. Hal. 28-30.
19. Dewan Riset Nasional. Sambutan Panitia Pengarah Simposium Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta 17 September 1994.
20. Sayogyo. Kecamatan miskin, desa miskin, desa tertinggal dan penduduk miskin. Makalah pada Simposium Nasional Penanggulangan Kemiskinan. DRN. Jakarta 17 Sptember 1944. Hal. 5675.
21. Siagian, H.H. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Simposium Nasional Penanggulangan Kemiskinan. DRN. Jakarta, 17 September 1994.
22. Tanner, J.M. The Interaction of heredity and environment in the control of growth. In: *Foetus in to Man, Physical Growth From Conception to Maturity*. Open Books, 1978. pp. 117-126.
23. Tomkin, A. Nutritional status and severity of diarrhoea among pre-school children in rural Nigeria. *Lancet*, i, 1980. pp. 860-862.
24. Tumbelaka, W.A.F.J. New aspects of malnutrition in Jakarta. *Paediatrica Indonesiana* 14. Nov-Des. 1974. pp. 189-197.
25. Wirosardjono, S. Peta kemiskinan. *Tempo* 15 Mei 1993.

## Lampiran :

## Daftar kecamatan miskin menurut prioritas penanggulangannya

PR		KABUPATEN		KECAMATAN
<b>PRIORITAS 1 : M1 = 1, M2 = 1</b>				
13	05	PADANG PARIAMAN	10	V KOTO
	01	PESISIR SELATAN	01	PANCUNG SOAL
			02	RANAH PESISIR
			03	LENGAYANG
			04	BATANG KAPAS
			06	BAYANG
			07	KOTO XI TERUSAN
	02	SOLOK	03	PANTAIAI CERMIN
	03	SAWAHLUNTO/SJJ	01	KOTO BARU
			02	PULAU PUNJUNG
			03	TANJUNG GADANG
			04	SIJUNJUNG
			08	KOTO TUJUH
			09	SUMPUR KUDUS
	04	TANAH DATAR	04	RAMBATAN
			05	LIMA KAUM
	05	PADANG PARIAMAN	09	VII KOTO SEI SARIK
	06	AGAM	11	PALUPUH
	08	PASAMAN	04	BONJOL
33	01	CILACAP	03	MAJENANG
			04	CIMANGGU
			08	KARANG PUCUNG
			10	JERUK LEGI
	01	CILACAP	16	NUSAWUNGU
	02	BANYUMAS	09	SOMA GEDE
			13	PURWOJATI
	03	PURBALINGGA	03	KEJOBONG
			07	KUTASARI
			08	MREBET
			10	KARANGREJO
			11	KARANGANYAR
			13	REMBANG
	04	BANJARNEGARA	05	BAWANG
			06	BANJARNEGARA

		09	BANJARMANGU
		12	PUNGGELAN
		13	KARANGKOBAR
		14	PAGENTAN
		15	PEJAWARAN
		17	WANAYASA
		18	KALIBENING
05	KEBUMEN	01	AYAH
		02	BUAYAN
		03	PURING
		04	PETANAHAAN
		07	AMBAL
		08	MIRIT
		09	PREMBUN
		11	ALIAN
		12	KEBUMEN
		13	PEJAGOAN
		14	SRUWENG
		17	RAWAKEKE
		20	KARANG ANYAR
		21	KARANG GAYAM
		22	SADANG
06	PURWOREJO	01	GRABAG
		04	BAGELEN
		05	KALIGESING
		10	BUTUH
		11	PITURUH
		12	KEMIRI
		14	GEBANG
		15	LOANO
		16	BENER
07	WONOSOBO	01	WADASLINTANG
		02	KEPIL
		03	SAPURAN
		04	KALIWIRO
		05	LEKSONO
		06	SELOMERTO
		07	KALIKAJAR
		10	WATUMALANG
		11	MOJO TENGAH
08	Magelang	01	SALAMAN

		02	BOROBUDUR
		05	SRUMBUNG
		09	SAWANGAN
		11	MARTOYUDAN
		12	TEMPURAN
		13	KAJORAN
		14	TEMANGGUNG
		15	BANDONGAN
		16	WINDUSARI
		17	SECANG
		18	TEGALREJO
		21	NGABLAK
09	BOYOLALI	02	AMPEL
		03	CEPOGO
		04	MUSUK
		10	SAMBI
		11	NGEMPLAK
		12	NOGOSARI
		14	KARANGGEDE
		15	KLEGO
		18	WONOSEGORO
10	KLATEN	06	TRUCUK
		23	KOMALANG
11	SUKOHARJO	11	GATAK
13	KARANGANYAR	07	NGARGOYOSO
		13	GONDANGREJO
14	SRAGEN	01	KALI JAMBE
		02	PLUPUH
15	GROBOGAN	02	KARANG RAYUNG
		05	GEYER
		09	NGARINGAN
		12	GROBOGAN
		13	PURWODADI
		15	KLAMBU
		17	GUBUK
16	BLORA	03	KRADENAN/MENDEN
		09	BLORA
		12	NGAWEN
		14	TODANAN
17	REMBANG	01	SUMBER
		03	GUNEM

		04	SALE
		05	SARANG
		06	SEDAN
		07	PAMOTAN
		08	SULANG
		09	KALIORI
		11	PANCUR
		12	KRAGAN
18	PATI	02	KAYEN
		05	PUNCAKWANGI
		06	JAKEN
		09	JAKENAN
		14	TLOGOWUNGU
20	JEPARA	01	KEDUNG
		03	WELAHAN
		06	BONANG
		12	MIJEN
22	SEMARANG	01	GETASAN
		03	SUSUKAN
		12	BRINGIN
23	TEMANGGUNG	11	CANDIROTO
		12	TRETEP
24	KENDAL	01	PLANTUNGAN
		03	PEGERUYUNG
		04	PATEAN
25	BATANG	01	WONO TUNGGAL
		02	BANDAR
		03	BLADO
		04	REBAN
		05	BAWANG
		06	TERSONO
		09	SUBAN
		10	TULIS
		12	WARUNG ASEM
26	PEKALONGAN	01	KANDANG SERANG
		02	PANINGGARAN
		05	TALUN
		08	KAJEN
27	PEMALANG	01	MOGA
		02	PULOSARI
		03	BELIK

			04	WATU KUMPUL
			05	BODEH
			06	BANTAR BOLANG
			10	PETARUKAN
28	TEGAL		02	BUMI JAWA
			03	BOJONG
			04	BALAPULANG
			05	PAGERBARANG
			07	JATINEGARA
			09	PANGKAH
			12	ADIWERNA
			14	TALANG
			15	TARUB
			16	KRAMAT
			17	SURADADI
29	BREBES		01	SALEM
			02	BANTAR KAWUNG
			06	TONJONG
			08	KETANGGUNGAN
			09	BANJARHARJO
			11	TANJUNG
			12	KERSANA
			15	JATIBARANG
52	02	LOMBOK TENGAH	05	KOPANG
			06	PRAYA
	03	LOMBOK TIMUR	02	SAKRA
<b>PRIOROTAS 2 (A): M=1, M2=0</b>				
13	01	PESISIR SELATAN	05	IV JURAI
	02	SOLOK	02	SUNGAI PAGU
			11	X KOTO SINGKARAK
			12	SEPULUH KOTO DIATAS
	04	TANAH DATAR	06	TANJUNG EMAS
	06	AGAM	04	MATUR
			05	EMPAT KOTO
			06	BANUHAMPU SEI PUAR
	07	50 KOTO	05	HARAU
			07	KAPUR SEMBILAN
	08	PASAMAN	02	LEMBAH MELINTANG
			06	TALAMAU

33	03	PURBALINGGA	04	KALIGONDANG
			12	KARANGMONCOL
	04	BANJARNEGARA	11	RAKIT
	06	PURWOREJO	02	NGOMBOL
	07	WONOSOBO	08	KERTEK
			09	WONOSOBO
	08	MAGELANG	04	SALAM
			06	DUKUN
			07	MUNTILAN
			08	MUNGKIT
	09	BOYOLALI	06	MOJOSONGO
	10	KLATEN	01	PRAMBANAN
			02	GANTIWARNO
			03	WEDI
			04	BAYAT
			10	MANISRENGGO
			15	KARANGDOWO
			17	WONOSARI
			22	JATIANOM
	14	SRAGEN	04	KEDAWUNG
	15	GROBOGAN	06	PULO KULON
	20	JEPARA	04	MAYONG
	21	DEMAK	07	DEMAK
			09	DEMPET
	24	KENDAL	05	SINGOREJO
			11	GEMUH
			13	CEPIRING
	26	PEKALONGAN	06	DORO
			09	KESESI
			10	SRAGI
			12	WONOPRINGGO
			13	KEDUNGWUNI
			15	TIRTO
	27	PEMALANG	11	AMPEL GADING
			13	ULUJAMI
52	04	SUMBAWA	05	ALAS
			06	UTAN-RHEE
	06	BIMA	01	MONTA
			06	SAPE
			08	RASANA E

			09	DONGGO
13	04	TANAH DATAR	09	SUNGAI TARAB
	07	50 KOTO	02	GUGUK
			03	PAYAKUMBUH
	05	KEBUMEN	06	BULU PESANTREN
	26	PEKALONGAN	16	WIRADESA
	27	PEMALANG	07	RANDU DONGKAL
	06	AGAM	02	LUBUK BASUNG
	01	CILACAP	01	DAYEHLUHUR
			12	MAOS
			13	ADIPALA
			14	KROYA
			15	BINANGUN
	02	BANYUMAS	16	PAKUNCER
			20	BATURADEN
	04	BANJARNEGARA	04	PURWONEGORO
			08	MADUKARA
	05	KEBUMEN	18	SEMPOR
	08	MAGELANG	19	PAKIS
			20	GRABAG
	09	BOYOLALI	16	ANDONG
	11	SUKOHARJO	10	BAKI
	13	KARANGAANYAR	14	KEBAK KRAMAT
	14	SRAGEN	05	SAMBIREJO
	15	GOBOGAN	11	TAWANGHARJO
	16	BLORA	11	BANJAREJO
	18	PATI	01	SUKOLILO
			03	TAMBAK KROMO
			17	GUNUNG WUNGKAL
	20	JEPARA	05	BATUALIT
	22	SEMARANG	07	BANYUBIRU
			09	SOMOWONO
	26	PEKALONGAN	11	BOJONG
52	01	LOMBOK BARAT	06	GUNUNG SARI
	03	LOMBOK TIMUR	05	MASBAGIK
	04	SUMBAWA	14	EMPANG

**PRIORITAS 2(B): M1 = 0, M2 = 1**

	02	LOMBOK TENGAH	01	PRAYA BARAT
13	04	TANAH DATAR	10	SALIMPAUNG

33	02	BANYUMAS	01	LUMBIR
			02	WANGON
			12	PATIKRAJA
			15	GUMELAR
	05	KEBUMEN	06	KUWARASAN
	10	KLATEN	16	JUWIRING
	11	SUKOHARJO	05	NGUTER
			07	POLOKARTO
			08	MOJOLABAN
	12	WONOGIRI	01	PRACIMANTORO
			02	GIRITONTRO
			16	KISMANTORO
			17	PURWANTORO
			18	BULUKERTO
			19	SLOGOHIMO
	13	KARANGANYAR	02	JATIYOSO
			04	JUMANTORO
			08	KARANG PANDAN
			15	MOJOGEDANG
			16	KERJO
	14	SRAGEN	13	GEMOLONG
			15	SUMBER LAWANG
			17	SUKODONO
	15	GROBOGAN	18	TEGOWANU
	16	BLORA	02	RANDU BLATUNG
			04	KEDUNG TUBAN
			06	SEMBONG
			13	KUNDURAN
	17	REMBANG	02	BULU
	18	PATI	18	CLUWAK
	20	JEPARA	02	PACAGAAN
	22	SEMARANG	05	SALATIGA
	23	TEMANGGUNG	06	KALORAN
				09 JUMO
	25	BATANG	07	GRINGSING
	08		08	LIMPUNG
	02	BANYUMAS	21	SUMBANG
			22	KEMBARAN
			09	BOBOTSARI
	04	BANJARNEGARA	07	SIGALUH
			10	KUTOWINANGUN

		15	ADIMULYA
07	WONOSOBO	12	GARUNGAN
09	BOYOLALI	17	KEMUSU
10	KLATEN	09	JOGONALAN
		21	TULUNG
11	SUKOHARJO	01	WERU
		06	BONDOSARI
12	WONOGIRI	04	BATUWARNO
		08	EROMOKO
		15	JATIROTO
		01	KEDUNGJATI
		03	PENAWANGAN
16	BLORA	07	JIKEN
		08	JEPON
17	REMBANG	13	SLUKE
18	PATI	07	BATANGAN
		11	GABUS
21	DEMAK	13	WEDUNG
23	TEMANGGUNG	02	BULU
		07	KONDANGAN
27	PEMALANAG	09	TAMAN
28	TEGAL	06	LEBAKSIU
29	BREBES	04	PAGUYANGAN
		07	LARANGAN
		10	LOSARI
		13	BULUKAMBA
		14	WANASARI
52	04	03	TALIWANG

## Keterangan :

PR13 = SUMBAR

M1 = Cara1

PR33 = JATENG

M2 = Cara2

PR52 = NTB